

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, R. d. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi & Ekonimika*, Vol 9 No. 1, 112.
- Amanu, A. M. (2020). *Analisis Tranparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Study kasus Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*. Pasuruan.
- Fernanda, M. Y. (2021). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Pada Bumdes Kerto Raharjo Kecamatan Turen Kabupaten Malang*. Malang.
- Handayani, A. S. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Dorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu*.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Jojonomic. (n.d.). Retrieved from Jojonomic.com:
<https://www.jojonomic.com/blog/transparansi/>
- Kompas.Com. (2023, Juni 30). *Pengertian Anggaran Menurut Para Ahli*. Retrieved from Kompas.Com: <https://www.kompas.com>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Palira, P. (n.d.). Retrieved from <https://pusbimtekpalira.com/aspek-transparansi-pada-pemerintah-desa/>
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. GRASINDO.
- Situmeang, N. (2020). *Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin*. Jambi.
- Sumarto, S. W. (n.d.). *Akuntabilitas Dana Desa*. Retrieved from BPKP:
<https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/akuntabilitas-dana-desa>
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua*. Banda Aceh: READ.

Zalukhu, R. N. (2020). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara*. Medan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa